

## ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGAP DARURAT BENCANA UNTUK MENUNJANG *BUSINESS CONTINUITY* PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Kathya Irsmi Sufa<sup>1\*</sup>, Daru Lestantyo<sup>2</sup>, Bina Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Diponegoro

\*Corresponding author : [kathyairsmisufa@gmail.com](mailto:kathyairsmisufa@gmail.com)

### ABSTRACT

*The development of the industry at this time entered the industrial revolution 4.0 which is supported by all forms of information technology. Emergency response is a form of management effort in protecting production activities in the company and avoiding the risk of accidents, it has in common with the principle of business continuity. The purpose of this study is to analyze disaster emergency response to support the business continuity of manufacturing companies. This research is qualitative, data collection techniques using in-depth interviews with three main informants and two triangulation informants. The results of this study include training, implementation and policy, communication, life-saving facilities, organization and business continuity, and finding conditions that still need attention from forms of training, communication, and organization regarding occupational safety and health in the disaster emergency response process to support the application of business continuity planning. The training provided by the company is under the standards, but there are still shortcomings from the involvement of management. The communication provided by the company is not active, communication is conveyed when there is something that needs to be conveyed. The organization has P2K3 and emergency response, but there is still no equal distribution of emergency response structures in each unit of the manufacturing company.*

**Keyword:** *Emergency Response, Business Continuity, Manufacture*

## PENDAHULUAN

Dampak perkembangan revolusi industri 4.0 sangatlah pesat dengan adanya kemajuan teknologi membuat sumber daya manusia dalam industri manufaktur semakin berkurang. Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada mesin-mesin di perusahaan juga banyak terjadi seperti mesin industri yang melebihi kapasitas penggunaan, kurangnya pengecekan standar mesin dan masih banyak kecelakaan kerja yang disebabkan oleh mesin, sehingga perusahaan tetap membutuhkan adanya sumber daya manusia sebagai pengawas keberjalanan mesin dan mengontrol perkembangan kelayakan mesin. Hal tersebut merupakan bentuk dari upaya diadakannya penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan yang dikemas dalam bentuk kesiapan kedaruratan bencana.<sup>1</sup>

Kecelakaan dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam menggunakan peralatan kerja, kurangnya alat pelindung kerja, dan kurangnya ketrampilan tenaga kerja. Kecelakaan kerja tersebut dapat menimbulkan risiko tinggi seperti kerugian ekonomi, mengakibatkan kerugian pada tenaga kerja, dan lingkungan kerja menjadi tidak aman dan nyaman.<sup>2</sup>

Berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan menjelaskan untuk suatu perusahaan dengan tingkat risiko kebakaran tinggi maka wajib adanya pembentukan sistem tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat.<sup>3</sup>

*Business continuity planning* atau perencanaan keberlangsungan bisnis merupakan bentuk dari pengembangan dan implementasi *Business Continuity Management* (BCM). Keberlangsungan bisnis merupakan sebuah proses untuk mengembangkan dan untuk mendokumentasikan berbagai pengaturan dan prosedur pada organisasi agar dapat menanggapi peristiwa yang sedang berlangsung hingga waktu yang belum dapat diketahui selesainya bencana (DRII, 2008: hal. 3). Konsep ini dapat dicapai dengan membuat perencanaan mengenai pemulihan fungsi bisnis utama ketika mengalami bencana.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis implementasi tanggap darurat bencana mulai dari pelatihan, implementasi dan kebijakan, komunikasi, sarana

penyelamat jiwa, organisasi, dan business continuity perusahaan manufaktur.

## METODE PENELITIAN

Rancangan ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif observasional, sampel yang diambil menggunakan cara *purposive sampling*. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu informan utama dan triangulasi, informan utama diambil tiga orang pekerja yaitu dari ahli K3, staf pekerja dan keamanan perusahaan. Sedangkan untuk informan triangulasi-nya diambil dua orang pimpinan dari perusahaan grup dan perusahaan unit.

Teknik dari pengumpulan data diambil dengan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan cara daring atau online karena adanya keterbatasan penelitian. Selain itu ada juga berdasarkan observasi yang diambil melalui *google form* kepada tim P2K3 dari salah satu unit perusahaan karena adanya keterbatasan penelitian, dan studi pendahuluan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Pelatihan Tanggap Darurat Perusahaan

Pelatihan tanggap darurat diberikan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada pekerja agar memahami bahaya yang ada di perusahaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, seluruh kegiatan terkait kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dilakukan untuk mengantisipasi dengan melakukan pelatihan, perencanaan dan pengorganisasian yang tepat.

Pada penelitian ini diketahui bahwa pelatihan yang diberikan kepada pekerja baru dan juga pekerja yang akan menaikkan status pekerjaannya. Pelatihan yang diadakan perusahaan umumnya mengenai tanggap darurat kebakaran dengan pelatih yang sudah disiapkan dari internal perusahaan. Perusahaan juga memberikan sosialisasi internal dan seminar mengenai tanggap darurat agar pekerja lebih memahami bahaya-bahaya yang ada di perusahaan. Pihak manajemen menyatakan bahwasannya pelatihan tanggap darurat sudah baik dan sudah menjadi kewajiban dari pimpinan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja terkait tanggap darurat.

Perencanaan pelatihan tanggap darurat menjadi bagian dari budaya perusahaan. Adanya pelatihan tanggap darurat perusahaan

membuat kesadaran pekerja berkembang, pekerja menjadi terdidik dan terlatih, dan prosedur tanggap darurat layak untuk diterapkan. Perencanaan melibatkan dari seluruh tingkatan perusahaan mulai dari manajemen, departemen dan tingkatan pekerja, serta menjadikan manajemen kedaruratan menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan personel sehari-hari.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pihak manajemen yang menjadi penanggung jawab pelatihan jarang mengikuti ketika diadakannya pelatihan. Pekerja paham bahwasannya pelatihan yang diberikan adalah hal wajib, namun banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya pada saat terjadi kondisi darurat. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya bentuk keterampilan dalam pelatihan yang diberikan kepada pekerja. Keterampilan tanggap darurat pekerja dapat dilatih pada kegiatan jumat sehat yang membuat tubuh dari pekerja menjadi sehat dan pekerja tetap dapat melatih dirinya untuk selalu tanggap dalam kondisi kedaruratan.

Pelatihan merupakan bentuk evaluasi kemampuan dari suatu program keberjalanan prosedur. Hal ini memungkinkan individu dan organisasi untuk dapat mempraktikkan prosedur dan berinteraksi dalam pengaturan yang terkendali, sehingga pekerja dapat mengidentifikasi maupun memberikan usukan untuk kesinambungan program.<sup>6</sup>

### **B. Analisis Implementasi dan Kebijakan Tanggap Darurat Perusahaan**

Penerapan kebijakan merupakan bentuk pelaksanaan terencana pada keadaan darurat. Kebijakan yang diterapkan meliputi analisis kerentanan, perencanaan pada operasi perusahaan (audit), melatih karyawan dan evaluasi rencana.<sup>5</sup>

Pada penelitian diketahui bahwa implementasi dan kebijakan yang ada di perusahaan sudah sesuai standar, dibuktikan dengan adanya pencapaian sertifikasi ISO yang dipasang di area tunggu tamu, pemasangan poster keselamatan pada area produksi, larangan membawa barang tajam dan korek api ke dalam area perusahaan, kebijakan perusahaan yang terpasang pada area produksi dan rapat, adanya pemeriksaan tubuh (*body checking*) oleh petugas keamanan. Hal ini tertuang dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Keselamatan Kerja.

Pimpinan perusahaan harus memiliki komitmen terhadap program untuk mencegah, mengurangi konsekuensi, melakukan persiapan, merespons, menjaga kontinuitas selama bencana hingga pulih. Pemimpin juga harus mampu mengembangkan, menerapkan, dan mengelola program manajemen, melakukan pencatatan untuk memastikan bahwa catatan tersedia untuk pekerja setelah insiden. Implementasi penerapan prosedur untuk menyimpan, mengambil, dan memulihkan catatan di tempat atau di luar kantor, serta dilakukan proses peninjauan catatan.<sup>6</sup>

### **C. Analisis Komunikasi Perusahaan Terhadap Tanggap Darurat**

Komunikasi sangatlah penting dalam hal operasi bisnis. Apabila terdapat kegagalan dalam menyampaikan komunikasi akan menjadi bencana, dan perusahaan dapat menghentikan kegiatan bisnis. Fungsi dari komunikasi yaitu melaporkan keadaan darurat, memperingatkan bahaya yang dapat menimpa pekerja, memberi tahu pekerja tentang kondisi di perusahaan, mengoordinasikan tindakan dan tetap menjalin komunikasi dengan pelanggan yang sudah atau akan bekerjasama.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini, komunikasi yang dilakukan perusahaan kepada pekerja melalui media seminar internal tentang K3, Saat pelaksanaan seminar, pimpinan memberikan arahan dan panduan tentang upaya perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja saat berada di area perusahaan.

Komunikasi dalam kondisi kedaruratan dilakukan melalui perintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengampu kedaruratan. Supaya komunikasi kedaruratan terlaksana dengan baik, dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang dirancang untuk kondisi kedaruratan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil temuan lapangan, komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan kepada pekerja masih belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini terjadi, karena proses komunikasi yang di bangun masih bersifat satu arah. Sehingga terdapat beberapa kendala pada pekerja yang tidak bisa tersampaikan. Sementara itu, pekerja harus memenuhi target kinerjanya capaiannya. Sehingga banyak pekerja yang

masih kurang mengindahkan aspek keselamatan kerja.

Kebijakan *reward* dan *punishment* yang diterapkan oleh perusahaan masih perlu di evaluasi lebih lanjut. Evaluasi tidak hanya meliputi capaian dari hasil, namun harus dilakukan secara menyeluruh. Target yang di berikan kepada pekerja sebagai bagian dari proses operasioanalisis perusahaan dengan menggunakan kaidah K3. Sehingga *reward* tentu akan di berikan kepada pekerja yang mampu memenuhi terget yang telah ditetapkan dan mengikuti prosesur K3 dengan baik dan benar.

Dampak proses komunikasi yang masih searah, menyebabkan banyak pekerja yang memenuhi target kinerjanya dengan mengabaikan prosedur K3. Komunikasi yang dibangun tidak harus menunggu ketika terjadi kondisi kedaruratan, tetapi proses komunikasi tetap harus dibangun saat perencanaan bisnis tersebut di lakukan. Sehingga semua proses yang dilaksanakan bisa sesuai dengan harapan.

Prosedur komunikasi adalah metode yang digunakan untuk memberi tahu mengenai program sebelum suatu peristiwa terjadi dan untuk memberi tahu karyawan bahwa program tersebut diaktifkan dan tersedia setelah terjadinya suatu peristiwa.<sup>6</sup>

#### D. Analisis Sarana Penyelamat Jiwa Terkait Tanggap Darurat

Fungsi dari sarana penyelamat jiwa yaitu untuk melindungi sarana dan prasarana peralatan yang ada di perusahaan dan melindungi dokumen penting untuk memulihkan keberjalanan produksi perusahaan setelah terjadi keadaan darurat.<sup>5</sup>

Pada penelitian yang dilakukan ditemukan adanya sarana penyelamat jiwa perusahaan berupa APD, APAR, *hydrant pump*, APAT, kotak P3K, mobil pemadam, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Sarana penyelamat jiwa yang ada di perusahaan memiliki ketentuan terkait pengecekan berkala dan mendapat audit yang baik dari tim audit internal maupun eksternal. Namun, berdasarkan hasil temuan lapangan, terdapat penunjuk jalur evakuasi yang tertutupi oleh barang, kotak P3K yang sulit dijangkau oleh pekerja, dan terdapat beberapa tangga darurat yang *handle* dan kemiringan yang dapat membuat pekerja jatuh. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pihak inspeksi dalam perusahaan yang hanya dilakukan satu bulan sekali, sedangkan pekerja melakukan aktivitas pekerjaan setiap hari selama 8 jam dengan

waktu istirahat 1 jam per-hari. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya tindakan pengecekan lapangan oleh ahli K3 pada kondisi lapangan secara rutin minimal 2 hari sekali per-minggu.

Penggunaan waktu untuk keadaan tanggap darurat dimulai dari pengiriman pasukan dan tim pemadam kebakaran, waktu tempuh menuju lokasi, dan waktu sampainya pemadam kebakaran hingga pemadaman. Faktor penunjang waktu tanggap darurat terkait dari pemberian pelayanan oleh tim pemadam yang melibatkan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran.<sup>7</sup>

#### E. Analisis Struktur Organisasi Tanggap Darurat

Fungsi utama dan fungsi organisasi merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sedangkan untuk struktur organisasi adalah bentuk standar dan konsistensi perusahaan dalam menghadapi insiden. Organisasi menetapkan prosedur diantaranya untuk mengumpulkan, berbagi, dan mengelola informasi terkait insiden.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, ditemukan adanya struktur organisasi terkait tanggap darurat bencana pada perusahaan. Selain struktur organisasi tersebut, perusahaan juga memiliki susunan P2K3, dalam struktur ini perusahaan sudah mendapatkan pengesahan dari Disnaker Provinsi Jateng.

Perkembangan struktur organisasi dibentuk mulai dari atas hingga bawah dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas insiden, serta bahaya yang ada di lingkungan perusahaan.<sup>6</sup> Organisasi tanggap darurat bencana merupakan bentuk organisasi satu komando. Susunan organisasi harus terdapat garis komando dan tanggung jawab yang jelas.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, struktur organisasi yang ada di perusahaan sudah terpenuhi namun masih terdapat beberapa unit perusahaan yang masih belum sesuainya susunan kepengurusan struktur tanggap darurat. Penggolongan bencana pada perusahaan hanya kebakaran, ada juga unit perusahaan yang memiliki tanggap darurat bencana banjir, karena pada tahun 2012 perusahaan sempat menghentikan aktifitas perusahaan.

Banjir, serangan dunia maya, gangguan IT, berkurangnya pasokan bahan baku, hingga hilangnya staf terampil merupakan beberapa kemungkinan ancaman terhadap kelancaran

organisasi. Apabila bentuk ancaman tidak ditangani secara efektif, akan dapat menyebabkan gangguan atau bahkan kegagalan bisnis. Perencanaan dan pengorganisasian harus bersifat konsisten untuk apa yang harus dilakukan ketika bencana berarti respons yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih cepat.<sup>8</sup>

Berdasarkan struktur organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, organisasi perlu adanya pedoman mengenai tata kerja penanggulangan bencana di suatu daerah. Pembentukan dan penyusunan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Kepengurusan terdiri dari kepala, unsur pengarah dan unsur pelaksana.<sup>9</sup>

#### F. Analisis *Business Continuity* Perusahaan

Pemulihan bisnis atau dimulainya kembali bisnis merupakan upaya untuk tetap menjaga sumber daya tetap bekerja dan bisnis tetap berjalan.<sup>5</sup> Perencanaan dari keberlangsungan bisnis mencakup dari bentuk strategi pemulihan dan identifikasi tindakan kritis selama dampak bisnis.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa proses keberlangsungan bisnis sudah diketahui baik dari pihak manajemen dan juga dari pekerja. Keberlangsungan bisnis bagi mereka adalah bentuk dari perusahaan secara kontinyu agar kecelakaan dapat diminimalisir. Keberlangsungan bisnis juga dapat membuat nyaman dan aman kepada pekerja dan pengunjung yang ada di perusahaan dengan adanya kebersihan lingkungan perusahaan yang terjaga dengan baik. Selain itu, keberlangsungan bisnis juga perlu untuk tetap menjalin komunikasi agar tidak ada kesalahan yang berakibat fatal, sehingga perusahaan tidak ada gangguan dan tetap berjalan dengan lancar. Hal tersebut merupakan komitmen dari pihak manajemen perusahaan agar tidak adanya risiko bahaya dan bahaya. Mengingat komitmen dari pihak manajemen, maka perlu adanya tahap evaluasi risiko dan tetap menciptakan suasana nyaman dan puas kepada pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan ketetapan dari ISO 22301 untuk semua organisasi, hal ini juga memiliki nilai sertifikasi dan terdapat badan pengawas. Ketentuan ini dilakukan karena menilai dari kemampuan organisasi perusahaan untuk dapat memenuhi persyaratan hukum. Struktur ini sejalan dengan standar sistem manajemen

yang diakui secara internasional, seperti ISO 9001 (manajemen mutu) dan ISO 14001 (manajemen lingkungan). ISO 22301 (*business continuity management*) memiliki fungsi dalam hal menyinambungkan kegiatan bisnis dengan risiko yang ada pada instansi atau tempat kerja.<sup>8</sup>

Hasil yang ditemukan pada kondisi dilapangan, bentuk dari penerapan keberlangsungan bisnis di perusahaan masih dalam tahap *induction* dan hal tersebut tidak diberikan kepada pekerja setiap harinya. Mengingat penelitian yang dilakukan pada kondisi pandemi Covid-19, maka didapatkan hasil dari upaya perusahaan saat ini sedang dalam penerapan keberlangsungan bisnis. Pihak manajemen perusahaan mengizinkan pekerja untuk tetap bekerja dengan menggunakan peraturan protokol kesehatan, pembatasan jam kerja pada pekerja, dan pemberian vitamin kepada pekerja.

Proses keberlangsungan bisnis diterapkan pada model gunung es. Proses dari gunung es merupakan bentuk pemikiran dari sebuah sistem yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam menghadapi pola perilaku, struktur pendukung, dan kondisi mental pada suatu peristiwa tertentu. Dampak kerugian yang terlihat berupa biaya langsung dan tidak langsung, dimana untuk biaya langsung dapat dilihat dari penanganan korban kecelakaan kerja. Sedangkan untuk biaya tidak langsung dilihat dari kerugian lain yang bisa jadi berlipat jumlahnya dari biaya langsung.<sup>10</sup>

#### KESIMPULAN

Perusahaan dalam memberikan pelatihan kepada pekerja sudah baik, namun masih terdapat pekerja yang belum menerapkan dengan baik dalam kondisi pekerjaannya dan masih perlu adanya pemantauan pihak manajemen terkait simulasi yang diadakan. Terkait penerapan implementasi dan kebijakan yang ada di perusahaan sudah baik dengan tujuan agar pekerja bisa lebih aman dan nyaman bekerja. Pengkomunikasian terkait K3 pada perusahaan masih kurang karena hanya berupa sosialisasi dan penerapan poster yang ada di area produksi. Sarana penyelamat jiwa perusahaan sudah sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa alat yang masih perlu diperhatikan. Struktur organisasi sudah ada berupa P2K3 dan adanya organisasi tanggap darurat, namun masih belum seluruh

unit memiliki struktur tanggap darurat yang sesuai. Penerapan program *Business Continuity* bagi pekerja dipahami sebagai keberlangsungan pekerjaan agar mereka tetap dapat bekerja, dan berdasarkan pihak manajemen komitmen untuk nama baik perusahaan.

#### SARAN

Saran bagi manajemen untuk memperhatikan pekerjaannya, seperti mengikuti pemeriksaan kondisi yang ada dilapangan, mengikuti kegiatan simulasi yang diadakan kepada pekerja, dengan tujuan agar pekerja juga merasa diperhatikan oleh pihak manajemen. Selain itu juga untuk pemberian *safety talk* dapat mulai diterapkan kepada pekerja setiap harinya. Serta dalam bentuk penerapan dari keberlangsungan bisnis dapat dilakukan oleh perusahaan dengan permainan saat jumat sehat dengan tujuan untuk tetap menjaga kesehatan dan juga dapat melatih keterampilan pekerja dalam kondisi kedaruratan.

Saran untuk pekerja untuk dapat mematuhi adanya bentuk kebijakan yang sudah diberikan perusahaan dan jika terdapat keadaan yang tidak sesuai dapat mengkomunikasikan atau menginfokan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam kondisi pekerjaan.

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan peninjauan ulang mengenai adanya keberlangsungan bisnis pada perusahaan dengan menerapkan konsep gunung es yang digunakan untuk meneliti adanya dampak kerugian yang diterima oleh pekerja dan perusahaan dalam skala kecil, menengah maupun besar.

3. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000. Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta; 2000.
4. Chandra, Keefe Darius. Penerapan Business Continuity Pada Bank Central Asia. Volume 21 Nomor 1, 2017. Bandung
5. FEMA 141. 1993. *Emergency Management Guide dor Business and Industry. A Step by Step Approach to Emergency Planning, Response and Recovery for Companies of All Sizes*
6. NFPA 1600 Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. ISBN: 978-145590648-2. 2013
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
8. ISO 22301 Tahun 2012 tentang Solusi Keberlangsungan Bisnis
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. The Iceberg Model by M. Goodman, 2002. Hopkinton, MA: Innovation Associates Organizational Learning.
11. Oktarina, Rienna, and Wenny Gustamola. *Pemetaan Sistem Konfigurasi Jaringan Komunikasi Dan Informasi Tanggap Darurat Bencana Di Indonesia*. 2010.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Sulistyani, Endah. *Magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pura Barutama Kudus. Hiperkes Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret*. 2011. Surakarta
2. Dianu, R. *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.